

Mekanisme Pengelolaan *Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan di Sulawesi Selatan

Mechanism of Management Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan in South Sulawesi

Syarifuddin

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar
Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah II No. 25 Makassar, Telp. 0411-4660084

syarif_akbar@gmail.com

Diterima : 29 Juli 2013 || Revisi : 15 Agustus 2013 || Disetujui: 21 Agustus 2013

Abstrak – *Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) merupakan program pemerintah yang diharapkan dapat menjadikan seluruh desa di Indonesia menjadi “Desa Pinter” melalui pemanfaatan teknologi informasi. Program MPLIK sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan akses internet memerlukan pengelolaan yang baik. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pengelolaan MPLIK di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan adalah penanggung jawab, pengelola dan operator MPLIK. Hasil penelitian menunjukkan dari 24 kabupaten/kota terdapat 7 kabupaten menyatakan bahwa biaya operasional MPLIK ditanggung bersama antara Pemerintah Daerah dan Penyedia Jasa, sedangkan 7 kabupaten lain, ditanggung pemerintah daerah melalui APBD, selebihnya 10 kabupaten/kota ditanggung pihak penyedia. Berkaitan dengan operasional MPLIK, 3 kabupaten yang mengoperasionalkan MPLIK tersebut dilandasi dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak Pengelola/Pemerintah. Perekrutan operator/sopir MPLIK juga bervariasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pengelola (Dinas Perhubungan dan Kominfo) merekrut tenaga operator dan supir di 14 kabupaten/kota sedangkan 5 kabupaten/kota yang melakukan perekrutan hasil kerja sama ketiga pengelola yakni Pemda, PT. Telkom dan PT. WEB, selebihnya 4 kabupaten/kota dilakukan oleh Pihak Penyedia Jasa dan 1 kabupaten/kota oleh Kelompok Informasi Masyarakat. Mekanisme pemeliharaan perpanjangan KIR MPLIK juga cukup beragam, terdapat 16 kabupaten/kota oleh pihak penyedia jasa, 2 kabupaten/kota yang perpanjangan KIRnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan terdapat 6 kabupaten/kota yang menyatakan belum tahu karena disamping belum beroperasi secara maksimal juga masih ada yang aktif KIR nya.

Kata Kunci: internet, mekanisme pengelolaan, MPLIK

Abstract - MPLIK is a government program that is expected to make the whole village in Indonesia to "Pinter village" through the use of information technology. MPLIK as acceleration increased affordability of internet access service distribution requires good management. This study aims to determine the extent to which management Sulawesi MPLIK in the South. This methodh research make qualitative with some informan is manager and operator MPLIK. Results showed from 24 districts/cities have 7 districts stated that MPLIK operational costs are shared between the Regional Government and Service Providers, while 7 borne by local government, the remaining 10 districts/cities borne by the provider. Related to the operation MPLIK 3 districts that are based MPLIK operationalize the Cooperation Agreements between the busines/government. Recruitment operator / driver MPLIK also vary, from the results of research in the field shows that the manager of the (Department of Transportation and Communications and Information Technology) recruit operators and drivers, 14 districts / cities while the 5 districts/cities are doing the same work recruiting the third manager Local Government, PT. Telkom and PT. WEB, the remaining 4 districts / cities do the Service Provider and 1 regency / city by The Information Society. Maintenance mechanism that is an extension of KIR MPLIK also quite diverse, there are 16 districts / cities by the service provider. 2 districts / cities that extension its KIR conducted by the Local Government and there are 6 districts/cities that states do not know because in addition to the maximum operating yet still there are still active KIR.

Keywords: internet, mechanism of management, MPLIK

PENDAHULUAN

Rendahnya pemerataan pembangunan dan akses komunikasi dan informasi khususnya untuk daerah wilayah timur Indonesia menjadikannya sebagai

daerah tertinggal dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berakibat pada terjadinya kesenjangan digital. Dilain pihak adanya tuntutan akan persamaan hak pada semua kelompok masyarakat untuk menikmati kemudahan mengakses

dan menggunakan informasi melalui keberadaan teknologi informasi, menyebabkan perlunya dilakukan program-program upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika. Karena itu percepatan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi di wilayah timur Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Program Kewajiban Pelayanan *Universal Service Obligation* (USO) yang dananya bersumber dari kontribusi penyelenggara telekomunikasi sudah sangat tepat diharapkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Telecenter merupakan suatu fasilitas warga dimana mereka dapat berinteraksi, belajar, bekerja dan bermain dengan memanfaatkan komputer, internet dan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lainnya. Suku kata “Tele” yang berasal dari telekomunikasi memungkinkan warga berinteraksi, belajar, bekerja dan bermain dengan pihak di luar daerahnya, bahkan dengan pihak internasional. Walaupun berbeda-beda bentuknya, *telecenter* mempunyai karakteristik khusus yaitu mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti membantu kegiatan peningkatan kesehatan, pendidikan dan ekonomi; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara, berdemokrasi dan pembangunan; meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berorganisasi dan melakukan usaha; meningkatkan peran serta pemuda/i dan perempuan; mengurangi keterisolasi; mengurangi kesenjangan digital.

Telecenter merupakan tempat mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan sosial dan ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer dan sambungan ke internet. Kegiatan ini dengan “*World Summit Information Technology*” yang dideklarasikan di Geneva tahun 2003 bahwa untuk tahun 2015 diharapkan seluruh desa di dunia sudah terhubung secara *online*. Selain itu *telecenter* diharapkan merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang antara lain berupa pelatihan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan serta pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat secara profesional yang didukung oleh fasilitas *telecenter*.

Mobile Pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) secara bertahap sebanyak 1907 unit ke

pelosok daerah dan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat 105 unit MPLIK. Program ini diharapkan dapat menjadikan seluruh desa di Indonesia menjadi “Desa Pinter” melalui pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat sehingga kelak masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Pelosok dapat menikmati manfaat dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Betapa besar harapan pemerintah untuk meminimalkan kesenjangan digital di daerah-daerah pedesaan melalui penyebaran *Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) sehingga menjadi menarik untuk diketahui secara detail mekanisme pengelolaan MPLIK di daerah pedesaan khususnya di Sulawesi Selatan. Untuk mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan akses internet maka dibutuhkan manajemen pengelolaan MPLIK yang lebih baik. Pengelolaan MPLIK harus memperhatikan mekanisme penganggaran menyangkut kejelasan sumber anggaran untuk operasional dan instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan MPLIK, bagaimana perekrutan SDM yakni tenaga sopir dan operator MPLIK. Selain itu, mekanisme pengoperasian MPLIK juga harus diperhatikan diantaranya kebutuhan-kebutuhan untuk operasional MPLIK sampai dengan pemeliharaan yang dilakukan terhadap peralatan operasional MPLIK baik itu perpanjangan KIR maupun standar keamanan yang diberlakukan untuk menjaga peralatan MPLIK. hal tersebut menjadi sangat urgen untuk kelancaran operasional MPLIK.

Dari latar belakang masalah seperti tersebut, maka dapat dirumuskan pokok masalahnya yakni: 1) Bagaimana Mekanisme Pengelolaan *Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Sulawesi Selatan; 2) Bagaimana bentuk sosialisasi Pemda terhadap MPLIK di Sulawesi Selatan; 3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengoperasian MPLIK di Sulawesi Selatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Mekanisme Pengelolaan *Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui bentuk sosialisasi MPLIK di Sulawesi Selatan. 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan MPLIK di Sulawesi Selatan. Sementara manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak atasan dalam perumusan kebijakan tentang pengelolaan MPLIK kedepan dan referensi penelitian

lanjutan oleh pihak lain termasuk akademisi yang ada hubungannya dengan tema tersebut.

Menurut Robert T. Kiyosaki & Sharon L, *pengelolaan* adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya dan terutama pengelolaan informasi. Sementara Wollemborg mengatakan bahwa *pengelolaan* merupakan suatu proses yang digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan supaya mereka dapat mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *pengelolaan* adalah merupakan:

1. Suatu proses, cara, perbuatan mengelola ;
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Di era teknologi informasi seperti sekarang ini, tentu saja sebuah desa apalagi desa tersebut di dalamnya terdapat potensi wisata alam yang perlu dipublikasikan tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang tahu akan kecanggihan teknologi. Salah satu nya adalah internet. Warga di sekitar kawasan tersebut sangat dituntut untuk menguasai manfaat internet, paling tidak mereka menguasai dasar-dasar produk internet seperti portal berita *online*, pencarian data, *blogging*, *email*, jejaring sosial, dan lain sebagainya. Minimal para pelajar setempat yang tahu akan produk-produk internet. Karena dengan mengenal manfaat internet, warga sekitar akan bisa menyebarkan potensi wisata alam dan budaya yang mereka miliki. Untuk itu kehadiran MPLIK hingga ke desa-desa diharapkan dapat menghubungkan masyarakat pedesaan dengan wilayah lainnya baik dalam negeri maupun negeri lainnya, bukan itu saja tetapi melalui MPLK, masyarakat dapat banyak belajar akan pemanfaatan teknologi informasi tersebut.

MPLIK (*Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan) merupakan program Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) melalui BPPPTI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika) dalam rangka peningkatan pola pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang informasi dan

telekomunikasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengatakan *Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) adalah sebuah kendaraan roda empat jenis truk Elf yang di dalamnya terdapat enam unit Laptop yang sudah terhubung dengan layanan internet, televisi dan sambungan telepon. *Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dirancang agar masyarakat di daerah bisa menikmati akses internet seperti masyarakat perkotaan. Beliau berharap adanya *Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) meminimalisir kesenjangan informasi antara masyarakat di daerah dengan perkotaan, karena itu Menkominfo meminta agar masyarakat bisa menjaga dan merawat *Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

Adapun manfaat MPLIK diantaranya :

1. Membuka wawasan Masyarakat dalam melihat dunia khususnya melalui internet
2. Meningkatkan percepatan layanan bidang masyarakat misalnya pembuatan KTP /KK secara elektronik , pembayaran PLN online dll
3. Melakukan penyuluhan dan pelatihan masyarakat secara interaktif dengan video
4. Mengurangi kesenjangan digital.

Dengan keberadaan MPLIK, memungkinkan terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi serta akses internet bagi masyarakat di kecamatan dan di kabupaten diseluruh pelosok Indonesia, dengan cara mengunjungi kecamatan secara bergantian, sehingga kecamatan yang sebelumnya tidak terjangkau akses internet maka dapat dijangkau dengan adanya sarana tersebut

MPLIK diharapkan menjadi salah satu sarana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi agar tercipta homogenitas pengetahuan. Hal ini tentunya sesuai dengan UU No. 36 tentang Telekomunikasi. Jadi dengan adanya MPLIK ini, "akses menuju dunia" versi masyarakat desa mulai berjalan. Jika program ini bisa terlaksana dengan baik maka dampak yang dapat dirasakan adalah kesamaan pengetahuan dan persepsi tanpa mempedulikan letak geografis penduduk Indonesia melalui pemanfaatan 1.907 MPLIK di daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menuju masyarakat informasi itu penting dalam kondisi saat ini karena Masyarakat Informasi menghadapkan kita pada tantangan-tantangan baru

dan kesempatan perkembangan-perkembangan menuju seluruh ranah dari masyarakat. Dampak dari teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sebuah definisi sementara yang kuat, dan ini menransformasi aktivitas ekonomi dan sosial. Kunci yang penting dari jaringan teknologi dalam masyarakat informasi adalah teknologi membantu kita untuk membuat koneksi-koneksi baru. Koneksi-koneksi dimana tantangan tradisional menerima apa yang mungkin, dan ketika hal tersebut menjadi mungkin. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi bagian penting untuk masyarakat informasi sebagai ekonomi kecil yang terbuka di dalam pengembangan jaringan ekonomi global, dimana pengetahuan berbasis pada inovasi yang menjadi kunci sumber dari penopang keuntungan yang kompetitif.

Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) sangat penting untuk mewujudkan lingkungan ekonomi global yang berpengetahuan dan oleh karenanya memainkan peran yang penting dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan menghapus kemiskinan. Potensi TIK untuk memberdayakan masyarakat sangat besar. Hal ini terutama dalam kasus untuk orang cacat, wanita, generasi muda dan pribumi. TIK dapat membantu membangun kapasitas dan keterampilan untuk menciptakan peluang kerja yang lebih banyak, membantu usaha kecil dan menengah, dan meningkatkan partisipasi serta menginformasikan pembuat keputusan pada setiap level melalui peningkatan pendidikan dan latihan, khususnya bila disertai dengan penghormatan sepenuhnya terhadap keanekaragaman bahasa dan budaya.

Dengan adanya MPLIK diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat desa, dengan internet mereka dapat menjangkau dunia luar dengan mengakses situs-situs yang berguna untuk pengembangan desa dan hal itu tentunya sesuai dengan moto MPLIK: "Jangan Biarkan Yang Terpencil Semakin Terkucil". Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Informasi dan Komunikasi, Suprawoto mengatakan Kemenkominfo telah memulai pelayanan umum bidang komunikasi semacam ini sejak tahun 2009 lalu mengatakan bahwa: "Kami sadar bahwa setiap daerah memiliki kondisi alam yang beragam sehingga berdampak pada infrastruktur. Keadaan inilah yang menjadi awal kebijakan sehingga komunikasi harus dilaksanakan negara." Diakukannya, infrastruktur komunikasi belum merata disetiap

daerah yang ada di Indonesia, khususnya di KTI. Sehingga, kewajiban negara untuk meratakannya. Salah satu caranya, pemerintah membuat kebijakan, operator komunikasi harus menyerahkan sebagian pendapatannya untuk membangun infrastruktur komunikasi dan informasi di daerah-daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan informan penelitian yang dipilih yaitu penanggung jawab, pengelola hingga operator MPLIK dan mereka yang dianggap kelompok yang mengelola MPLIK tersebut.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 2 (dua) cara, yaitu (1) observasi, (2) wawancara mendalam. Observasi adalah untuk memotret / mengidentifikasi kondisi setting sosial lokasi penelitian, dan kondisi obyektif lain yang dideskripsikan melalui narasi hasil observasi/pengamatan peneliti.

Wawancara mendalam bertujuan untuk menggali permasalahan sampai pada solusi yang dicapai untuk mempersiapkan layanan MPLIK. Peneliti dalam hal ini memilih informan kunci (top manajemen pengelola MPLIK di lembaga yang bersangkutan, dengan menggunakan alat perekam (*tape recorder*), kemudian dinarasikan ke dalam teks (laporan asli).

Setelah data dikumpulkan dilanjutkan dengan kegiatan pengolahan data (*data processing*), yang mencakup *editing* dan *coding*. Penyajian data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan dipaparkan secara deskriptif guna penarikan simpulan. Kegiatan analisis ketiga ialah menarik simpulan dan verifikasi. Simpulan yang dikemukakan dalam penelitian ini bersifat induktif, tidak berdasar pengujian hipotesis. Dengan demikian, dalam penelitian ini, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi merupakan proses analitis yang jalin-menjalin selama berlangsungnya penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

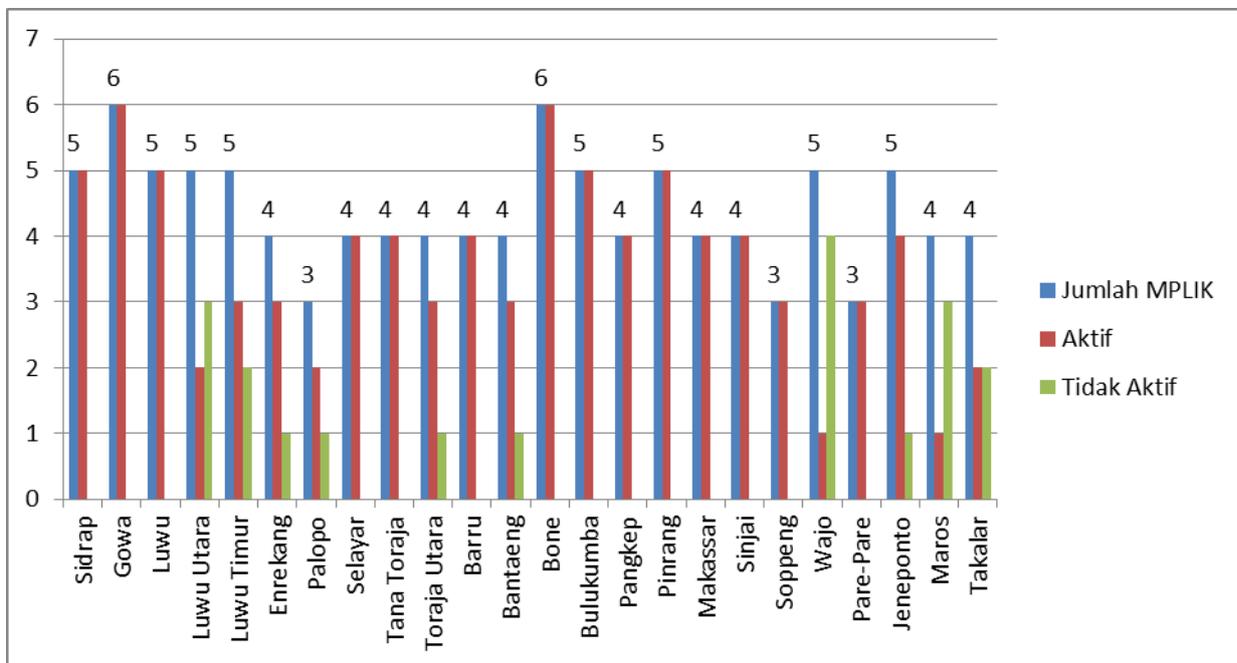
Provinsi Sulawesi Selatan, secara administratif terbagi atas 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 wilayah kabupaten dan 3 wilayah kota, yakni Kota Makassar, Parepare, dan Palopo. Penelitian ini dilaksanakan diseluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Daftar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Daftar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/ Kota	Pusat Pemerintahan	Kec
1.	Bantaeng	Bantaeng	8
2.	Barru	Barru	7
3.	Bone	Watampone	27
4.	Bulukumba	Bulukumba	10
5.	Enrekang	Enrekang	12
6.	Gowa	Sunggu Minasa	13
7.	Jeneponto	Jeneponto	11
8.	Selayar	Benteng	9
9.	Luwu	Palopo	13
10.	Luwu Timur	Malili	13
11.	Luwu Utara	Masamba	11
12.	Maros	Maros	14
13.	Pangkep	Pangkajene	12
14.	Pinrang	Pinrang	12
15.	Sidrap	Sidenreng	11
16.	Sinjai	Sinjai	8
17.	Soppeng	Watan Soppeng	8
18.	Takalar	Takalar	9
19.	Tana Toraja	Makale	29
20.	Toraja Utara	Rantepao	21
21.	Wajo	Sengkang	13
22.	Kota Makassar	Makassar	14
23.	Kota Palopo	Palopo	9
24.	Kota ParePare	Parepare	3

Kegiatan penelitian dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota. Instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang terdiri dari Jumlah MPLIK di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Mekanisme Pengelolaan MPLIK di Sulawesi Selatan yang meliputi Mekanisme Pengoperasian MPLIK dan Mekanisme Pemeliharaan MPLIK, serta bentuk sosialisasi dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan MPLIK di Sulawesi Selatan.

Jawaban-jawaban yang diperoleh dari daftar pertanyaan tersebut kemudian dikodekan berdasarkan kesamaan-kesamaan jawaban dari masing-masing penanggung jawab MPLIK di setiap lokasi penelitian untuk selanjutnya dinarasikan sebagaimana mestinya sebuah penelitian kualitatif. Dari 1600 unit MPLIK yang sudah disebar di seluruh Indonesia sampaitahun 2012, sebanyak 105 unit tersebar di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Gowa dan Bone masing-masing mendapatkan 6 unit dan jumlah ini yang terbanyak dibanding dengan wilayah lainnya di Sulawesi Selatan. Data jumlah pendistribusian MPLIK di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan ditunjukkan pada Gambar 1.

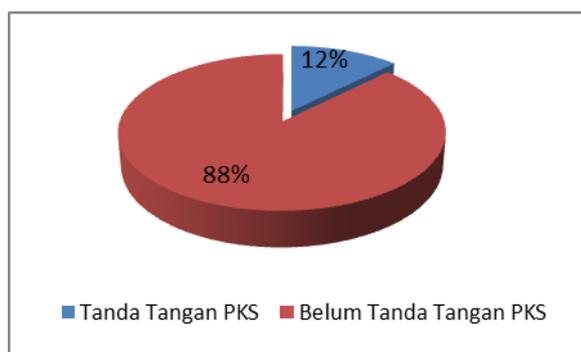


Gambar 1 Grafik kondisi MPLIK di Sulawesi Selatan

Dalam pengoperasionalan MPLIK di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hanya 3 kabupaten yang mengoperasionalkan MPLIK tersebut dilandasi dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara

pihak Pengelola/Pemerintah dengan Pihak Penyedia MPLIK/pihak ketiga, yakni Kabupaten Gowa, Bantaeng dan Soppeng. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa termasuk ke tiga kabupaten

tersebut yang secara aktif mengoperasikan MPLIK di wilayahnya masing-masing.



Gambar 2 Grafik status pola kerjasama

Perihal mekanisme penganggaran operasional MPLIK di Sulawesi Selatan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kejelasan siapa sebenarnya yang diwajibkan untuk membiayai operasionalisasi MPLIK tersebut. Dari 24 kabupaten/kota yang memperoleh MPLIK di Sulawesi Selatan, terdapat 7 kabupaten yang menyatakan bahwa biaya operasional MPLIK ditanggung bersama antara Pemerintah Daerah dan Penyedia Jasa, sedang 7 kabupaten/kota juga yang menyatakan bahwa biaya operasional MPLIK terpaksa ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD karena kalau tidak demikian maka MPLIK tidak beroperasi dan selebihnya yakni 10 kabupaten/kota mengatakan biaya operasional MPLIK ditanggung pihak penyedia.

Terjadinya dualisme pembiayaan operasional MPLIK di Sulawesi Selatan disebabkan karena sebagian besar kabupaten/kota belum menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pihak Penyedia Jasa (PJ). Sementara perihal penjadwalan waktu operasional MPLIK di Sulawesi Selatan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 kabupaten/kota penerima MPLIK di Sulawesi Selatan terdapat 15 kabupaten/kota yang sudah menjadwalkan pengoperasian MPLIK sedang selebihnya yakni 9 kabupaten/kota belum menjadwalkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pelaporan dari hasil operasional MPLIK di lapangan nampaknya cukup bervariasi yakni terdapat 7 kabupaten/kota belum bisa melaporkan kegiatannya karena MPLIK yang dimilikinya belum beroperasi secara penuh, demikian pula terdapat 7 MPLIK yang melaporkan hasil kegiatannya secara berkala, sementara terdapat 3 kabupaten/kota membuat pelaporan hasil kegiatannya setiap bulan, sementara

yang memberikan pelaporan setiap hari terdapat 3 kabupaten/kota dan terdapat 3 kabupaten/kota yang juga melaporkan setiap minggunya.

Selain jadwal pelaporan kegiatan MPLIK, juga ditanyakan kepada responden perihal kepada siapa laporan tersebut ditujukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada keseragaman tujuan pelaporan atas kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana MPLIK di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Terdapat 9 Kabupaten/kota yang memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya ke Pihak Penyedia Jasa, sedang 5 kabupaten/kota melaporkan hasil kegiatannya ke Kominfo Pusat, demikian juga yang melaporkan ke Pemda sekaligus tembusan ke Pihak Penyedia Jasa ada 5 kabupaten/kota, sedang 5 kabupaten/kota lainnya yang belum membuat laporan karena belum beroperasi secara maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring MPLIK yang ada di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tetap dominan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD (Dinas Perhubungan Kominfo) yakni 19 kabupaten/kota sedang selebihnya terdapat 2 kabupaten/kota yang monitoringnya dilakukan oleh pihak penyedia jasa sementara terdapat 3 kabupaten/kota yang belum efektif memberikan laporan karena MPLIK belum beroperasi secara maksimal.

Dari sisi pemeliharaan MPLIK, hasil tabulasi data menunjukkan bahwa dalam hal perekrutan operator/sopir MPLIK juga cukup bervariasi, hal ini terbukti dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pihak pengelola dalam hal ini pemerintah daerah (Perhubungan dan Kominfo) pada umumnya yang melaksanakan perekrutan tenaga operator dan supir, yakni 14 kabupaten/kota sedang terdapat 5 kabupaten/kota yang melakukan perekrutan hasil kerja sama ketiga pengelola yakni Pemda, PT. Telkom dan PT. WEB, sedang selebihnya yakni 4 kabupaten/kota perekrutannya dilakukan oleh Pihak Penyedia Jasa dan 1 kabupaten/kota yang perekrutan operator dan supirnya dilakukan oleh Kelompok Informasi Masyarakat.

Dalam hal perpanjangan KIR MPLIK juga cukup beragam, namun pada umumnya dilakukan oleh Pihak Penyedia Jasa yakni terdapat 16 kabupaten/kota sedang ada 2 kabupaten/kota yang perpanjangan KIRnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan terdapat 6 kabupaten/kota yang menyatakan belum tahu karena disamping belum beroperasi secara maksimal juga masih ada yang masih aktif KIR nya.

Sosialisasi pengelolaan MPLIK di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara yang beragam namun pada intinya bahwa sosialisasi dilakukan agar masyarakat tahu akan tujuan diadakannya MPLIK tersebut. Media pemerintah daerah dalam bentuk tercetak maupun elektronik menjadi media yang sangat populer ditengah masyarakat dan media ini yang dominan dimanfaatkan untuk mensosialisasikan MPLIK tersebut. Di samping itu beberapa kabupaten/kota juga melakukan sosialisasi dengan cara langsung mengunjungi lokasi dimana lokasi tersebut sangat membutuhkan fasilitas internet. Hal ini cukup efektif karena langsung dilakukan pengenalan infrastruktur kepada masyarakat sekaligus langsung menggunakannya. Beberapa kabupaten/kota menggunakan x banner sebagai media sosialisasi MPLIK, di samping itu pemerintah daerah senantiasa memperkenalkan MPLIK pada setiap event yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya pameran pembangunan dan lain-lain. Sosialisasi dilakukan oleh pihak pemerintah daerah pada umumnya sejak MPLIK tersebut diterima oleh masing-masing kabupaten/kota dan hampir seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan membutuhkan waktu antara 1 – 2 bulan sebelum pemanfaatan MPLIK tersebut.

Dari Hasil penelitian di lapangan diperoleh beberapa rekomendasi dari responden dalam hal ini pihak pengelola, antara lain bahwa :

1. Untuk kelangsungan pengelolaan MPLIK tersebut perlu diperkuat melalui adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS).
2. Agar Pemeliharaan dapat dilaksanakan secara maksimal maka perlu ada kejelasan akan kepemilikan MPLIK.
3. Perlu peningkatan kapasitas *bandwith* agar koneksi internet lebih baik.
4. Perlu adanya peningkatan insentif secara wajar.
5. Sebaiknya operasional penggajian diserahkan ke pihak Pemda.
6. MPLIK sebaiknya segera dihibahkan ke pemerintah daerah.
7. Pihak penyedia jasa harus tanggap atas setiap laporan yang diterima dari pengelola.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi dalam pengoperasian MPLIK di daerah. Kendala-kendala tersebut membuat operasionalisasi MPLIK tidak maksimal. Adapun kendala-kendala tersebut dapat dirinci antara lain :

1. Pemerintah daerah belum diberikan kewenangan penuh dalam pengoperasionalan MPLIK tersebut sehingga pengelolannya belum secara maksimal.
2. Rendahnya biaya operasional dan penggajian kepada operator dan sopir membuat kerja mereka tidak maksimal.
3. Operation Sistem (OS) yang digunakan tidak familier dan menyulitkan pengguna sehingga kurang menarik dan masyarakat menjadi enggan untuk memanfaatkan MPLIK tersebut.
4. *Bandwith* yang rendah membuat minat pengguna kurang tertarik menggunakan MPLIK.
5. Pihak Penyedia jasa tidak peka atas setiap laporan kerusakan MPLIK.

KESIMPULAN

Sistem pelaporan dari hasil operasional MPLIK di lapangan nampaknya cukup bervariasi yakni terdapat 7 dari 24 kabupaten/kota belum bisa melaporkan kegiatannya karena MPLIK yang dimilikinya belum beroperasi secara penuh. tidak ada keseragaman tujuan pelaporan atas kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana MPLIK di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dimana terdapat 9 dari 24 Kabupaten/kota yang memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya ke Pihak Penyedia Jasa, sedang 5 kabupaten/kota melaporkan hasil kegiatannya ke Kominfo Pusat, demikian juga yang melaporkan ke Pemda sekaligus tembusan ke Pihak Penyedia Jasa ada 5 kabupaten/kota, sedang yang terdapat 5 kabupaten/kota yang belum membuat laporan karena belum beroperasi secara maksimal. Monitoring MPLIK yang ada di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tetap dominan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD (Dinas Perhubungan Kominfo) yakni 19 kabupaten/kota sedang selebihnya terdapat 2 kabupaten/kota yang monitoringnya dilakukan oleh pihak penyedia jasa sementara terdapat 3 kabupaten/kota yang belum efektif memberikan laporan karena MPLIK belum beroperasi secara maksimal.

Sosialisasi pengelolaan MPLIK di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara yang beragam namun pada intinya bahwa sosialisasi dilakukan agar masyarakat tahu akan tujuan diadakannya MPLIK tersebut. Sosialisasi tersebut dalam bentuk tercetak maupun elektronik menjadi media yang sangat populer ditengah masyarakat dan media ini yang

dominan dimanfaatkan untuk mensosialisasikan MPLIK tersebut. Di samping itu beberapa kabupaten/kota juga melakukan sosialisasi dengan cara langsung mengunjungi lokasi dimana lokasi tersebut sangat membutuhkan fasilitas internet. Hal ini cukup efektif karena langsung dilakukan pengenalan infrastruktur kepada masyarakat sekaligus langsung menggunakannya. Beberapa kabupaten/kota menggunakan x banner sebagai media sosialisasi MPLIK, di samping itu Pemerintah daerah senantiasa memperkenalkan MPLIK pada setiap event yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya pameran pembangunan dan lain-lain. Sosialisasi MPLIK tersebut diterima oleh masing-masing kabupaten/kota dan hampir seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan membutuhkan waktu antara 1 – 2 bulan sebelum pemanfaatan MPLIK tersebut.

Adapun kendala dalam pengelolaan MPLIK adalah Pemerintah daerah belum diberikan kewenangan penuh dalam pengoperasionalan MPLIK tersebut sehingga pengelolaannya belum secara maksimal. Rendahnya biaya operasional dan penggajian kepada operator dan sopir membuat kerja mereka tidak maksimal. Operation Sistem (OS) yang digunakan tidak familier dan menyulitkan pengguna sehingga kurang menarik dan masyarakat menjadi enggan untuk memanfaatkan MPLIK tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan operasional MPLIK pada masa-masa yang akan datang, sebaiknya penyerahan kewenangan secara penuh diserahkan kepada Pemda setempat. Perlu ada kejelasan kepemilikan MPLIK tersebut dan pengelolanya. Perlu adanya penambahan peningkatan daya kekuatan jaringan sehingga dalam mengakses internet dapat lebih cepat. Parabola yang digunakan sebaiknya menggunakan remote control agar tidak lagi operator yang menggerakkannya untuk mencari jaringannya. Perlu standar yang baku penggajian bagi operator dan

sopir. Honorarium operator dan alokasi dana untuk MPLIK harus ditinjau ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (2000). *Manajemen Penelitian*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Batam Pos. (2012). *Mobil Pusat Layanan Internet Mangkrak*. <http://www.batam.co.id>. Diakses 15 agustus 2013.
- Faisal, Sanapiah, (1995). *Format-format Penelitian Sosial (Dasar-dasar dan Aplikasi)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Heriyanto Trisno. (2012). *MPLIK Gorontalo hanya salah paham*. <http://inet.detik.com/read/2012/10/06/103708/2056227/398/>. Diakses 15 september 2013
- Heru Petrus. (2012). *Pemkab Kotim operasionalkan MPLIK ke Kecamatan*. <http://www.kalimantan-news.com>. Diakses 05 agustus 2013.
- Hidayat, (1986). *Definisi/Pengertian Efektifitas*. <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>. diakses 10 oktober 2013.
- Lubis Syarifuddin (2012). *Manfaat MPLIK dan usaha pemerataan jaringan internet*. <http://teknologi.kompasiana.com>. diakses 05 agustus 2013.
- Mobil Butut. (2011). *Daftar propinsi penerima Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)*. <http://rodabulat.blogdetik.com>. diakses 05 agustus 2013.
- Muhtarom Andi, (2012). *MPLIK Konmuter, Mobil Pintar yang Bantu Warga Pedesaan Rampungkan Urusan Tagihan*. <http://gaul.solopos.com>. Diakses 10 oktober 2013
- Rachman Taufik, (2012). *Status belum jelas enam mobil internet nganggur*. <http://www.republika.co.id>. diakses 18 agustus 2013.
- Riau Terkini, (2012). <http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=52538>. Diakses 18 Agustus 2013.
- Savitri A. (2009). *Definisi, asal, mula, pola, ciri dan romantikannya*. <http://anisavitri.wordpress.com>. diakses 05 agustus 2013.
- Yoyo, (2011). *Menkominfo akan serahkan MPLIK ke Kubar*. <http://www.tarakankota.go.id>. Diakses 02 oktober 2013.